BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran gelap narkoba merupakan ancaman serius bagi eksistensi bangsa Indonesia, yang tidak hanya merusak generasi muda namun juga menggerogoti sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran gelap narkoba, terutama karena posisi geografis Indonesia yang strategis di antara tiga benua (Asia, Australia, dan Afrika). Kondisi ini semakin diperparah oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi, kemajuan transportasi, serta pergeseran nilai materialistis dalam masyarakat yang menciptakan celah bagi berkembangnya peredaran gelap narkoba.¹

Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional, melibatkan modus operandi yang canggih, teknologi yang mutakhir, dan juga didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Hal ini menimbulkan banyak korban, terutama dikalangan generasi muda, yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.²

¹Agung Subekti, Nys Arfa, and Aga Anum Prayudi, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3, 2023, hlm. 359, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23529>, diakses pada 10 November 2024, Pukul 08.08 WIB.

²Abdul Muis, Harry Anwar, and Imas Rosdiawati, *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik*, Cet. ke-1, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2021, hlm.138

Meluasnya peredaran narkotika tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Kemajuan teknologi informasi yang justru mempermudah penyebaran narkotika ke berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya belum terjamah. Oleh karena itu, pengawasan oleh aparat penegak hukum harus ditingkatkan secara signifikan.³

Tabel 1.1
Data Kasus Pengedar Narkotika Di Ditresnarkoba Polda Jambi
Periode 2022 s/d 2024

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Pengedar Narkotika	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pengedar Narkotika
1.	2022	125	125
2.	2023	78	78
3.	2024 (Agustus)	87	87
Jumlah		290	290

Sumber : Ditresnarkoba Polda Jambi

Berdasarkan data Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi periode 2022 sampai dengan 2024, terjadi fluktuasi signifikan dalam jumlah kasus pelaku pengedar narkotika. Pada tahun 2022 tercatat 125, menurun menjadi 78 kasus pada 2023, dan hingga Agustus 2024 telah tercatat 87 kasus. Fluktuasi ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam

³Nabain Yakin, "Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 2020, hlm 21, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>, diakses pada 3 September 2024, Pukul 14.11 WIB.

upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Jambi. Meskipun kasus-kasus tersebut melibatkan distributor tingkat bawah, keberadaan mereka tetap memberikan kontribusi nyata terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Fenomena maraknya pengedar narkotika tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendorong seseorang terlibat dalam peredaran gelap ini. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, mengingat keuntungan yang besar yang diperoleh dari perdagangan narkotika. Faktor pendidikan juga memengaruhi seseorang menjadi pelaku pengedar narkotika, dimana rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman tentang bahaya narkotika serta ancaman hukuman membuat lebih rentan terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Faktor lingkungan sosial, seperti pergaulan dengan kelompok pengguna atau pengedar narkotika, turut memengaruhi seseorang untuk terjun ke dalam dunia gelap ini.⁴

Dalam upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)

⁴Muhammad Rizal Lampatta and Herlina Sulaiman, “Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat Obatan Terlarang Perspektif Kriminologi (Studi Kepolisian Resor Pohuwato),” *Jurnal Supremasi* 12, no. 2, 2022, 125-127, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1851>, diakses pada 18 Februari 2025, Pukul 21.07 WIB.

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

“Selain itu, masyarakat juga diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba, untuk menyampaikan laporan atau aduan kepada aparat penegak hukum yaitu POLRI atau BNN sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2) KUHAP.⁵”

“setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik”

Terkait dengan peran serta masyarakat yang diatur oleh hukum dalam Undang-Undang ini, masyarakat diberikan legitimasi untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Narkoba. Ini termasuk berperan aktif dalam mengawasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar dan segera melaporkan kepada instansi yang berwenang agar dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana narkoba yang terjadi.⁶

Kepolisian merupakan salah satu instansi yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Undang-Undang dan diberi wewenang untuk penegakan hukum serta upaya pencegahan sampai

⁵Lazuardi Maringan, Ronald J. Mawuntu, and Johnny Lembong, “Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkoba Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2009,” *Lex Crimen XI*, no. 2 2022, hlm 126, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38607>, diakses pada 3 September 2024, Pukul 14.14 WIB.

⁶Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi, and Dheny Wahyudhi, “Penanggulangan Badan Narkoba Nasional Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Anak,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (2023): 338, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23591>, diakses pada 27 September 2024, Pukul 21.52 WIB.

dengan penindakan hukum terhadap kejahatan, serta memberikan pelayanan menerima laporan dan aduan 1x24 jam.⁷

Direktorat Reserse Narkoba yang selanjutnya disebut Ditresnarkoba sebagai salah satu instansi penegak hukum memiliki peran sentral dalam upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 pada lampiran XVIII, menyatakan

“Ditrenarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.”

Wewenang ini diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 81 undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini.”

Ditresnarkoba ini diharapkan mampu menjadi faktor pencegah terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba jenis baru.⁸ Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Ditresnarkoba Polda Jambi, mengungkapkan bahwa proses pengungkapan terhadap pengedar narkoba masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.

⁷ Dien Nabila Naziva, Usman Usman, and Dessy Rakhmawati, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan Dan Kekerasan,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3, 2021, hlm 77, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16324>, diakses pada 10 Oktober 2024, Pukul 08.08 WIB.

⁸Agustin Firmansyah, Heru Widodo, and Damrah Mamang, “Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba,” *Veritas* 8, no. 2 2023, hlm 130, <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2066>, diakses pada 11 September 2024, Pukul 08.58 WIB.

Salah satunya adalah, dimana pengedar kerap menggunakan sel terputus sehingga sulit untuk menelusuri jejak hingga ke bandar utama. Selain itu, perkembangan teknologi yang digunakan oleh pelaku kejahatan narkoba menuntut strategi penanggulangan lebih adaptif dan inovatif dari aparat penegak hukum. Tantangan ini semakin mempertegas pentingnya evaluasi terhadap kinerja Ditresnarkoba Polda Jambi dalam menangani kasus-kasus narkoba.⁹

Penanggulangan kejahatan narkoba bukanlah persoalan sederhana, melainkan masalah kompleks yang butuh solusi terpadu dan melibatkan berbagai pihak.¹⁰ Dalam konteks penanggulangan tindak pidana pengedar narkoba, upaya yang dilakukan bersifat penal maupun non-penal. Upaya penal dilakukan melalui penegakan hukum pidana seperti melakukan penyidikan dengan cara *undercover buy* terhadap para pengedar narkoba. Sementara upaya non-penal dilaksanakan melalui berbagai program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penanggulangan tindak pidana pengedar narkoba oleh Ditresnarkoba Polda Jambi serta mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum. Maka penulis tertarik untuk

⁹Wawancara Dengan AKBP Nukmansyah, Kabag BIN OPS, Ditresnarkoba Polda Jambi, pada 26 September 2024.

¹⁰Monica Dwi Putri Nababan and Khabib Nawawi, "Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1, 2021, hlm 83, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8286>, diakses pada 25 November 2024, Pukul 21.30 WIB.

melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Penanggulangan Tindak Pidana Pelaku Pengedar Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pelaku pengedar narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dalam upaya penanggulangan tindak pidana pelaku pengedar narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi penanggulangan tindak pidana pelaku pengedar narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dalam upaya penanggulangan tindak pidana pelaku pengedar narkotika.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai bahan diskusi, memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya

terkait penanggulangan tindak pidana narkoba. Memperkaya literatur akademis tentang strategi pembebrantasan peredaran narkoba, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang Upaya penanggulangan narkoba serta mendorong partisipasi aktif dalam program pencegahan dan pelaporan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba.

E. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini dimaksudkan untuk dapat lebih mudah memahami maksud penulis, maka penulis akan memberikan definisi atau batasan dari konsep tersebut sebagai pengantar awal yaitu :

1. Penanggulangan

Dalam konteks penanggulangan kejahatan, penting untuk memahami bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan dimensi sosial yang lebih luas. Seiring dengan meningkatnya kejahatan di masyarakat, upaya untuk mengatasi masalah ini harus dilakukan secara komprehensif.

Menurut Sudarto dalam jurnal Adhika Abdillah, Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal " merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat

dalam menanggulangi kejahatan. " Definisi ini diambil dari defenisi Marc Ancel yang merumuskan politik kriminal sebagai "the rational organization of the control of crime by society"¹¹

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum.¹² Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaku Pengedar Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dengan tegas tentang pengedaran dan peredaran narkotika agar dapat menanggulangi bahaya yang ditimbulkannya. Dalam Undang-Undang ini, terdapat pasal-pasal yang mengatur larangan terhadap setiap tindakan yang berkaitan dengan narkotika, baik dalam bentuk penawaran, penjualan, maupun perantaraannya. Salah satu pasal yang penting adalah Pasal 114 Ayat (1) yang memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut.

Pasal 114 ayat (1) menyatakan "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

¹¹Andhika Abdillah et al., "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Teknologi Informasi" 34, no. 02, 2022, hlm. 12.
<https://journal.uniba.ac.id/index.php/GM/article/view/1140/753>. diakses pada 4 Desember 2024, Pukul 09.13 WIB.

¹²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 3.

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika”.

4. Narkotika

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, “Narkotika adalah zat atau obat yang beerasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang UU No. 35 Tahun 2009.”

5. Ditrektorat Reserse Narkoba

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika, peran kepolisian sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu unsur yang bertanggung jawab atas hal ini adalah Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba), yang memiliki tugas khusus dalam menangani berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. Sebagai lembaga yang berada di bawah Kapolda, Ditresnarkoba tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga terlibat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Hal ini diatur dengan jelas dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018.

“Berdasarkan Pasal 1 butir (21) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018, menyatakan bahwa Ditrektorat Reserse Narkoba selanjutnya disingkat Ditresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse pada tingkat polda yang berada di bawah Kapolda. Bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba. “

F. Landasan Teori

Landasan teori adalah pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Ia memuat teori-teori dan hasil penelitian yang digunakan sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan penelitian. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam skripsi ini mengenai “Penanggulangan Terhadap Pengedar Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi” maka teori ini yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap.¹³ Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana.

Penegakan hukum merupakan sistem pemerintahan yang terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, mencegah, memulihkan, atau menghukum pelanggar hukum sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

¹³Hisam Ahyani, Ais Surasa, and Santi Suryani, “Idealitas Penegakan Hukum Yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral Di Indonesia,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2, 2022, hlm. 110, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art4>, diakses pada 12 Februari 2025, Pukul 14.31 WIB.

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.¹⁴

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan, indikator penegakan hukum meliputi :

- a. Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-Undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.¹⁵
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.¹⁶
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.¹⁷
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan diaman hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 42.

¹⁵*Ibid*, hlm.43.

¹⁶*Ibid*, hlm. 47.

¹⁷*Ibid*, hlm. 51.

masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat.¹⁸

- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁹

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan salah satu aspek dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan kebijakan kriminal adalah, pengaturan secara rasional usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁰

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa dalam melakukan penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan dengan penal lebih

¹⁸*Ibid*, hlm. 60.

¹⁹*Ibid*, hlm. 64.

²⁰Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4, P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 158.

dititik beratkan pada pemeberantasan (*represif*) dan upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan dan penangkalan (*preventif*).²¹

Dalam konteks sarana penal dan non penal, upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utama adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan penggunaan sarana penal pada hakikatnya merupakan bagian dari satu langkah kebijakan (*policy*)

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

No	Identitas Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan
1.	Didik Budi Utomo (Skripsi 2023)	Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba di	Pada penelitian tersebut penulis lebih fokus pada penanggulangan serta rehabilitasi terhadap	Pada penelitian ini, penulis akan lebih fokus pada penanggulangan

²¹*Op Cit*, hlm.159.

		Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah	pengguna narkotika	terhadap pengedar narkotika.
2.	Nur Aini Tiara Putri (skripsi 2023)	Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur	Penelitian tersebut berfokus pada Menganalisis implementasi kebijakan P4GN dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jawa Timur, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program tersebut.	Fokus penelitian penulis yakni upaya penanggulangan pengedar narkotika oleh Ditresnarkoba Polda Jambi dan kendala dalam penanggulangan tersebut.

3.	Ryi As Rasyid (Skripsi 2022)	Tinjauan Kriminologis Pengedar Narkoba Jenis Ganja dengan Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polres Kampar	Pada penelitian tersebut berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan peredaran narkotika, dan juga penanggulangan	Perbedaan dalam penelitian, penulis akan berfokus pada penanggulangan terhadap pelaku pengedar narkotika dan kendala-kendala yang dihadapi
----	------------------------------	--	---	--

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Ditresnarkoba Polda Jambi, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 45, Tambak Sari, Jambi Selatan, Kota Jambi, 36138.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode penelitian empiris menurut Bahder Johan Nasution adalah :

“Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, Dimana hal ini mengahruskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan

secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.”²²

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²³

4. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, dengan maksud menggambarkan tentang penanggulangan terhadap pelaku pengedar narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

“Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.”²⁴

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.125.

²³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2020. hlm.105.

²⁴Bahder Johan Nasution, *Loc. Cit.*, hlm.145

Populasi dalam penelitian ini yaitu aparat penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia tepatnya Ditresnarkoba Polda Jambi.

2. Sampel

“Sampel adalah individu yang berkaitan dengan tema penelitian yang memberikan keterangan mewakili dari populasi dalam penelitian ini. Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini teknik purposive sumpling. Menurut Notoadmodjo (2010) teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas suatu pertimbangan, seperti ciri-ciri atau sifat-sifat suatu populasi.”²⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis melaksanakan pengumpulan data dengan metode wawancara. Proses wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber utama unit Ditresnarkoba Polda Jambi dengan narasumber AKBP Nukmansyah, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Kepala Pembinaan Operasional (Kabag BIN OPS), IPTU Hafran, S.A.P., PS. Panit Subdit 1, dan AIPDA Ismail, S.H., Banit Subdit 1.

6. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses yang terkesan sederhana, tetapi sebenarnya cukup kompleks.²⁶ Adapun sumber data yang dimaksud pada penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.

²⁵A. R. Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018.

²⁶Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan 2021, hlm.119

Dalam penelitian ini, sumber data dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data langsung kepada peneliti tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan unit kepolisian, tepatnya pada Ditresnarkoba Polda Jambi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung didapat oleh peneliti. Sumber ini dapat bersifat melengkapi sumber data sekunder meliputi buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya.

7. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian disusun dalam bentuk yuridis dan kemudian dianalisis secara kualitatif yakni dengan menganalisis tanpa perhitungan sistematis atau matematis dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan di antaranya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini adalah bab pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : bagian ini berisi uraian tentang penyelidikan, penyidikan, tindak pidana, ditresnarkoba, pengedar narkoba, narkoba, penyidik, penyidik.

BAB III PEMBAHASAN : pada bab ini berisi uraian hasil penelitian. Uraian dilakukan secara sistematis, metodologis, dan rasional berusaha untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB IV PENUTUP : bagian ini terdiri dari sub bab Kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban permasalahan penelitian. Saran disusun berdasarkan Kesimpulan.